

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 83 - 89

Konflik Maritim di Laut Natuna: Ancaman Keamanan Nasional Indonesia

Jihan Aisyah Ramadhania¹, Elsa Prida Tarigan², Nur Arba Asari³, Erbina Sembiring⁴, Alex Prayoga Sidabutar⁵, Dorlince Oktavia Hutapea⁶, Prayetno⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: aisyahjihhan09@gmail.com¹, elsafrida032@gmail.com², nurarbaasari9@gmail.com³, erbinasembiring40@gmail.com⁴, alexprayogasadabutar@gmail.com⁵, oktavia.hutapea19@gmail.com⁶, prayetno@unimed.ac.id⁷

ABSTRACT

This study aims to find out how conflicts often occur between Indonesia and China due to the struggle for ownership of the Natuna sea which has crossed the boundaries of the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), as well as finding out the role of the Indonesian government in protecting the territory of the Sovereignty of the Republic of Indonesia from foreign ships carrying out illegal activities. fishing in the North Natuna sea area. The type of research that the author uses in this research is library study by collecting information related to the required data such as journals, books, magazines and the results of previous research such as theses, theses, dissertations and other online information media to obtain the desired data. Based on the results of this research, the conflict that occurred between Indonesia and China occurred due to inconsistency in laws and regulations which resulted in the emergence of unclear government agencies as well as violations that were often committed by China by entering the boundaries of Indonesia's exclusive economic zone (ZEEI) and weakening Indonesia's security. . With this, the Indonesian government has made a firm policy by establishing diplomatic relations with Australia, Japan and America to maintain the security and defense of the sovereignty of the Republic of Indonesia from foreign countries that cross the boundaries of the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) as well as strengthening the defense equipment owned by the TNI to protect Indonesian security.

Keyword: *Indonesia-China, Natuna Sea, Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEEI)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik yang kerap terjadi antara Indonesia dengan China akibat perebutan kepemilikan laut Natuna yang sudah melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta mengetahui bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam melindungi teritori wilayah Kedaulatan Republik Indonesia dari kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di wilayah laut Natuna Utara. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan informasi terkait data yang diperlukan seperti jurnal, buku, majalah dan hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi serta media informasi online lainnya untuk memperoleh data yang di inginkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik yang terjadi antara Indonesia dengan China terjadi karena adanya ketidakselarasan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan terhadap instansi pemerintah serta pelanggaran yang kerap dilakukan oleh china dengan memasuki batas zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) serta melemahnya keamanan yang dimiliki Indonesia. Dengan hal ini, pemerintah Indonesia membuat kebijakan tegas dengan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Australia, Jepang dan Amerika untuk menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan Republik Indonesia dari negara asing yang melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta memperkuat alutsista yang dimiliki oleh TNI guna menjaga keamanan Indonesia.

Kata Kunci: *Indonesia-China, Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan kekayaan kelautan yang melimpah diakui sebagai salah satu negara maritim terkemuka di dunia. Kondisi geografisnya yang strategis, terbentang di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberikan Indonesia potensi besar sebagai negara dengan sumber daya kelautan yang luas dan beragam. Selain itu, jaringan pulau-pulau yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau memberikan (Prof. Dr, Dra., & Sandy Nur, 2019) ciri khas unik pada kehidupan dan kultur maritim Indonesia¹. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki identitas yang terkait erat dengan laut, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya, ekonomi, dan budayanya. Lautan tidak hanya menjadi jalur perdagangan dan transportasi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan ekosistem yang kaya dan sumber daya alam yang tidak ternilai.

Laut Natuna, bagian dari Kepulauan Riau di Indonesia, adalah salah satu wilayah kelautan yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan. Laut Natuna memiliki ciri khas yang istimewa dalam konteks kedaulatan maritim Indonesia. Wilayah ini terletak di antara Semenanjung Malaya dan Borneo, membentang di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan². Keberadaannya memosisikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki strategis atas jalur perdagangan penting di Asia Tenggara. Perairan Natuna merupakan perairan yang paling rawan terhadap *illegal fishing*, selain dikarenakan di perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar³. Berdasarkan penelitian Mahabror & Hidayat (2018). Perairan tersebut juga berada di perairan perbatasan dengan perairan internasional sehingga kemungkinan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia sangat terbuka.⁴

Natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah rative seluas 264.198,37 km² yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 km² dan luas lautan 262.197,07 km².⁵ Berdasarkan letak geografis tersebut Kepulauan Natuna menjadi kabupaten terluar dalam wilayah negara Kepulauan Indonesia sehingga rawan akan konflik dan *illegal fishing* terkait dengan batas maritim di perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. *Illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam Undang-undang baik itu dalam hal tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan yang dalam hal ini adalah menggunakan alat-alat tangkap yang dapat merusak

¹ Humas. (2019, April 22). *Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia*. Retrieved September 30, 2023, from SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA: <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>

² Prof. Dr, M. D., Dra., S. A., & Sandy Nur, R. I. (2019). *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna Mutiara di Ujung Utara*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

³ Novella, L. P. (2017). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2016 (STUDI KASUS: PERAIRAN NATUNA). *JOM FISIP*, 1-16.

⁴ Gayuh, D. N., Muhammad, Z., & Mieke, M. (2019). Konflik Batas Maritim, Illegal Fishing dan Upaya Penegakannya di Wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan Chin. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 185-193.

⁵ Alvin, A., Nazaki, & Nur, D. A. (2021). PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP PENGGUNAAN OBAT BIUS (POTASIMUM) OLEH NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA. *Student Online Journal*, 798-809.

kondisi ekosistem perairan maupun mencari ikan dengan tanpa memiliki izin penangkapan ikan yang merupakan juga ranah dari illegal fishing⁶. Laut Natuna menjadi pusat perhatian akibat eskalasi konflik maritim yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Konflik ini melibatkan klaim terkait wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, serta mendorong Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia memainkan peran penting dalam menghadapi ancaman keamanan nasional di Laut Natuna. AL memiliki tugas krusial dalam menjaga kedaulatan perairan, melindungi wilayah maritim, dan memastikan keamanan nasional di Ilega kompleksitas konflik maritim yang berkembang. AL Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia, termasuk di Laut Natuna. Tindakan dan operasi yang dilakukan oleh AL Indonesia adalah bentuk dari usaha melindungi sumber daya kelautan, dan memitigasi risiko keamanan akibat *illegal fishing*. AL Indonesia bertindak sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan mengamankan wilayah perairan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan buku, jurnal, majalah, surat kabar dan kajian-kajian lainnya sebagai bahan kepustakaan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Penelitian studi pustaka merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, karena dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perairan Natuna sangat kaya akan sumber daya alam dan berpotensi sebagai wilayah yang strategis. Terkonfirmasi dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016, mencatat Laut Natuna dipenuhi berbagai biota laut, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi.⁷ Sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2016 pelanggaran kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia pada perairan Laut Natuna utara untuk menangkap ikan secara ilegal sudah terjadi sebanyak tiga kali. China merasa tak bersalah dengan tindakannya karena menganggap perairan Natuna adalah lokasi penangkapan ikan sebagai bagian dari kawasan di Laut China *Selatan Nine Dash Line* yang dideklarasikan China pada 1947.

Berdasarkan Pasal 58 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), diatur bahwa lintas damai diperbolehkan melalui pantai zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara, namun kapal dari negara lain harus mematuhi ketentuan terkait hukum dan peraturan negara. Namun kapal penjaga pantai China tersebut melintasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia menuju Laut Natuna Utara tanpa izin. Namun, Tiongkok justru bertindak sebaliknya dengan mengirimkan kapal penangkap ikan ke zona ekonomi eksklusif Indonesia yang melanggar dan mencoreng

⁶ I Nyoman, C. R., Luh, S. P., & I Nyoman, S. G. (2021). SANKSI PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILEGAL FISHING) DI LAUT INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING. *Jurnal Prefensi Hukum*, 603-608.

⁷ Nuans Asa Septari B. 1, Gistyer Hasudungan Manullang 2, Aura Fatimah Azzahra S. 3, Bernadine Grace Alvania M. 4, Gracella Martauli Lumbantoruan 5, Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, volume 10, nomor 1, Hal 13-15

kedaulatan negara Indonesia. Saat ini *illegal fishing* merupakan ancaman yang sangat kuat di wilayah perairan Indonesia terutama di Laut Natuna selama beberapa tahun terakhir. Terjadinya *illegal fishing* ini didasari oleh dua hal, yaitu adanya ketidakselarasan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan terhadap instansi pemerintah dalam mengelola lahannya serta menciptakan *space* hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. China kerap sekali melanggar ZEE Indonesia serta turut serta dalam penangkapan ikan ilegal dalam beberapa kesempatan yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh China ini jelas sekali melanggar UU ZEE No. 5 Tahun 1983, khususnya pasal 7.⁸

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia semakin meningkat seiring dengan melemahnya tingkat keamanan yang bertugas dalam mengolah perairan Indonesia. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa penyebab utama *illegal fishing* adalah melemahnya pengawasan dan kondisi keamanan di perairan Indonesia, sehingga negara asing terutama negara tetangga dengan mudah dapat masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal.⁹

Strategi pertahanan merupakan suatu perangkat pertahanan dan bagian dari suatu kebijakan pertahanan yang memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara juga mempertahankan wilayah negara. Indonesia harus memetakan strategi pertahanan untuk mengatasi ancaman China dengan hati-hati dan efektif agar konflik dapat diselesaikan serta tidak meninggalkan kerugian bagi negara. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa yang berhak melakukan penyidikan saat terjadi penangkapan ialah PSDKP¹⁰ dan TNI AL. Untuk itu, pemerintah pusat telah merencanakan membangun bandara di wilayah Natuna untuk keperluan sipil dan militer agar dapat memudahkan pengawasan terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara Asia sebagaimana yang telah disebutkan.¹¹ TNI AL pada dasarnya merupakan lembaga terdepan dalam pertahanan dan keamanan negara. Namun Sangat disayangkan dalam hukum internasional TNI AL hanya diperbolehkan untuk berlayar di zona teritorial, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa TNI AL sama sekali tidak diperbolehkan untuk berlayar di ZEE.

Mengetahui hal tersebut, Presiden Joko Widodo langsung mengambil tindakan untuk mengunjungi Natuna. dan mengadakan rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 23 Juni 2016 yang dihadiri Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Bappenas Sofyan Djalil dan Menteri Luar Negeri. Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan penguatan keamanan laut serta memerintahkan TNI

⁸ UU ZEE No. 5 Tahun 1983 Pasal 7 Berbunyi “Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”.

⁹ Fisabilillah, L., & Alfath Richard, M. B. (2020). Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 439-447.

¹⁰ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibentuk pada 23 November 2000 sesuai dengan Keppres Nomor 164 Tahun 2000. Ditjen PSDKP bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya dalam mencegah kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur di perairan Indonesia.

¹¹ Darmawijaya, A. S., Ras, R. A., & Wardoyo, B. (2022, Januari). ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 64-74.

dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperkuat keamanan di perairan Natuna. (BBC, 2016).¹²

Beberapa strategi Indonesia adalah mengembangkan sistem pertahanan untuk mengatasi ancaman Tiongkok di Laut Utara Natuna¹³. Adapun hal yang dilakukan Indonesia demi memperkuat keamanan laut Natuna yaitu sebagai berikut:

1. Diplomasi pertahanan dengan negara-negara besar

Menghadapi ancaman Tiongkok di Laut Natuna Utara, Indonesia melakukan kerja sama pertahanan diplomatik dengan negara-negara besar, termasuk Australia. Kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia ini adalah Indonesia-Australia *Fisheries Monitoring Forum* (IAFSF). Program kerja Indonesia dan Australia adalah melaksanakan patroli maritim bersama, khususnya Patroli Jawline-Arafura yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Australian Border Force (ABF). Patroli Jawline-Arafura dilakukan untuk melindungi batas wilayah perairan Indonesia dan Australia dari oknum-oknum yang kerap mencuri aset biologis yang terkandung di dalamnya.

Setelah itu, Indonesia juga melakukan kerja sama diplomasi pertahanan dengan Jepang. TNI Angkatan Laut dengan kapal perang Pasukan Bela Diri Jepang (JMSDF). Latihan gabungan yang berlangsung dalam bentuk Passex (latihan passing) di ZEEI, barat daya Pulau Jemaja hingga terluar kawasan Natuna utara, dilakukan untuk menarik minat kerja sama antara negara lain dan Indonesia di bidang tersebut. menjalankan peran ini. diplomasi pertahanan di laut. Terakhir, kerja sama diplomasi pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Latihan gabungan berlangsung di perairan utara Natuna serta di perairan Batam, 480 km dari Natuna.

2. Meningkatkan kekuatan

Indonesia masih bisa mempertahankan Kepulauan Natuna dengan memperkuat postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Natuna. Indonesia memiliki tiga komponen di lingkungan TNI yang siap mempertahankan wilayah Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Laut (TNI AL), serta Tentara Nasional dan Angkatan Udara (TNI AU). Untuk menjaga Natuna, aspek maritim dan udara menjadi kunci bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara secara optimal dalam menjaga kawasan Natuna. Selain itu penggunaan anggaran militer juga bermanfaat dalam meningkatkan alutsista TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara seperti kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, rudal jarak jauh dan sensor untuk memudahkan pencarian posisi musuh di daerah tersebut. wilayah Natuna Laut Indonesia telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna sebagai upaya untuk melawan sikap tegas Tiongkok yang semakin meningkat atas klaimnya di Laut Cina Selatan. Jika alutsista digunakan dengan baik, TNI siap melakukan patroli di Natuna dan melawan pihak asing yang ikut campur dalam kedaulatan Indonesia. Dengan didirikannya pangkalan militer ini, Indonesia menunjukkan kesediaannya menjaga kedaulatannya atas Kepulauan Natuna dengan melawan ancaman Tiongkok.

Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Laut Natuna Utara terutama pada masa damai, Indonesia melaksanakan upaya pengendalian laut. Namun demikian, pengendalian laut yang dilaksanakan saat ini masih belum optimal karena masih adanya ancaman/kerawanan,

¹² Bbc Indonesia 2016. Rapat Di Natuna, Presiden Jokowi Minta Penjagaan Ditingkatkan. Bbc. Diambil Dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesi_jokowi_natuna_hasil

¹³ Nuans Asa Septari B. 1, Gistyger Hasudungan Manullang 2, Aura Fatimah Azzahra S. 3, Bernadine Grace Alvania M. 4, Gracella Martauli Lumbantoruan 5, Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, volume 10, nomer 1, Hal 13-15

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 83 - 89

belum terbangun *unity of effort* guna mendukung pengendalian laut secara kolaboratif antara TNI AL dan Bakamla RI serta belum efektifnya strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna Utara.¹⁴ Operasi laut yang telah dilaksanakan saat ini baik oleh TNI AL maupun K/L lainnya masih belum optimal. Secara garis besar terdapat tiga pokok persoalan yang diduga sebagai penyebab belum optimalnya strategi operasi laut dalam mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara yaitu masih adanya kerawanan atau ancaman di Laut Natuna Utara, belum terbangun *unity of effort* guna mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara dan sekitarnya secara kolaboratif, serta belum efektifnya strategi operasi yang diaplikasikan dalam melaksanakan pengendalian laut di wilayah Laut Natuna Utara.

KESIMPULAN

Laut Natuna menjadi isu yang hangat bagi keamanan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Konflik maritim di Laut Natuna menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia karena menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia semakin meningkat seiring dengan melemahnya tingkat keamanan yang bertugas dalam mengolah perairan Indonesia. Indonesia melaksanakan upaya pengendalian laut. Namun demikian, pengendalian laut yang dilaksanakan saat ini masih belum optimal karena masih adanya ancaman/kerawanan, belum terbangun *unity of effort* guna mendukung pengendalian laut secara kolaboratif antara TNI AL dan Bakamla RI serta belum efektifnya strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna Utara. Operasi laut yang telah dilaksanakan saat ini baik oleh TNI AL maupun K/L lainnya masih belum optimal. Secara garis besar terdapat tiga pokok persoalan yang diduga sebagai penyebab belum optimalnya strategi operasi laut dalam mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara yaitu masih adanya kerawanan atau ancaman di Laut Natuna Utara, belum terbangun *unity of effort* guna mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara dan sekitarnya secara kolaboratif, serta belum efektifnya strategi operasi yang diaplikasikan dalam melaksanakan pengendalian laut di wilayah Laut Natuna Utara. TNI AL juga terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman keamanan di laut, termasuk konflik maritim di Laut Natuna.

REFERENSI

- Alvin, A., Nazaki, & Nur, D. A. (2021). PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP PENGGUNAAN OBAT BIUS (POTASIMUM) OLEH NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA. *Student Online Journal*, 798-809.
- Bagus Badari Amarullah¹⁾, Suhirwan²⁾, Sutanto³⁾, Strategi Operasi Kolaborasi Tni Angkatan Laut Dan Badan Keamanan Laut Ri Dalam Pengendalian Laut Di Laut Natuna Utara, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 762-778
- Bbc Indonesia 2016. Rapat Di Natuna, Presiden Jokowi Minta Penjagaan Ditingkatkan. Bbc. Diambil Dari: https://www.bbc.com/Indonesia/Berita_Indonesia/2016/06/160623_Indonesia_Jokowi_Natuna_Hasil

¹⁴ Bagus Badari Amarullah¹⁾, Suhirwan²⁾, Sutanto³⁾, Strategi Operasi Kolaborasi Tni Angkatan Laut Dan Badan Keamanan Laut Ri Dalam Pengendalian Laut Di Laut Natuna Utara, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), Hal 762-778

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 83 - 89

- Darmawijaya, A. S., Ras, R. A., & Wardoyo, B. (2022, Januari). ILEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 64-74.
- Fisabilillah, L., & Alfath Richard, M. B. (2020). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 439-447.
- Gayuh, D. N., Muhammad, Z., & Mieke, M. (2019). Konflik Batas Maritim, Illegal Fishing dan Upaya Penegakannya di Wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan Chin. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 185-193.
- Humas. (2019, April 22). *Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia*. Retrieved September 30, 2023, from SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA: <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>
- I Nyoman, C. R., Luh, S. P., & I Nyoman, S. G. (2021). SANKSI PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILEGAL FISHING) DI LAUT INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING. *Jurnal Prefensi Hukum*, 603-608.
- Novella, L. P. (2017). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DIBIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2016 (STUDI KASUS: PERAIRAN NATUNA). *JOM FISIP*, 1-16.
- Nuans Asa Septari B. 1, Gistyger Hasudungan Manullang 2, Aura Fatimah Azzahra S. 3, Bernadine Grace Alvania M. 4, Gracella Martauli Lumbantoruan 5, Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, *10(1)*, 13-15
- Prof.Dr, M. D., Dra., S. A., & Sandy Nur, R. I. (2019). *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna Mutiara di Ujung Utara*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.